

KOLABORASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG

Disusun oleh:

NAMA : MARLINDA ERFANTI
NPM : 2242021068
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Marlinda Erfanti
NPM : 2242021068
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul tesis : Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui Bank
Sampah di Kota Tangerang

Diterima dan dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

(Prof Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA.)

Pembimbing II

(Dr. Asropl, SIP, M.Si.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

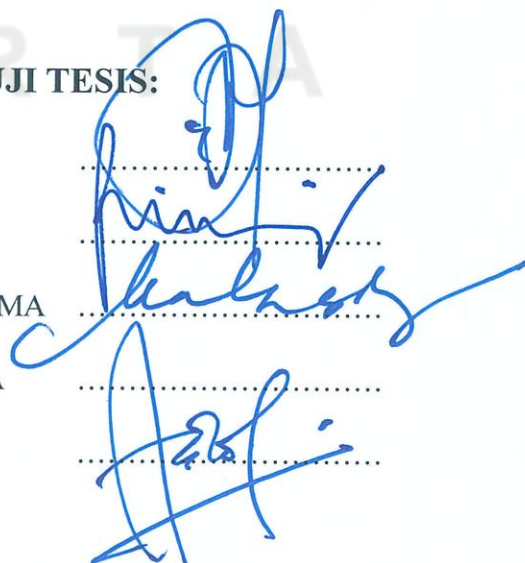
NAMA : Marlinda Erfanti
NPM : 2242021068
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
KONSENTRASI : Management Pembangunan Daerah
JUDUL TESIS : Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di
Kota Tangerang

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Megister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2025
Pukul : 08.30 s.d 10.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, M.Si



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marlinda Erfanti
NPM : 2242021068
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini hasil penelitian tesis yang telah saya buat dengan judul “Kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinil. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk gelar akademik tertentu di Universitas atau Institusi lainnya. Apabila dikemudian hari terungkap bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindakan plagiarisme, saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 05 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Marlinda Erfanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis yang berjudul "*Kolaborasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kota Tangerang*" ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Jurusan Adminitrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tesis ini disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kota Tangerang, serta mengkaji pengembangan bank sampah sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah terkait sistem pengelolaan bank sampah.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Asropi, M.Si selaku Pembimbing II, yang dengan sabar, pengertian dan penuh dedikasi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Ketua Tim Penguji Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si, Sekretaris Tim Penguji Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, dan Anggota Tim Penguji Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang membangun kepada penulis dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini.
3. Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Kepala Bidang Kebersihan Bapak Iwan, S.E, Subkoordinator Limbah B3 Anisa Listyaningsih, S.T,

Subkoordinator Pengurangan Sampah Dika Agus Hermaji, S.T. MAP. atas bantuan data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta atas ilmu, bimbingan, dan pengetahuan berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Suami tersayang Harjanto Handi Kusumo, S.T., dan ananda Amira Rafifatu Rifda atas segenap cinta, doa, dan pelukan hangat yang selalu menjadi penguat hati dalam setiap langkah perjuangan ini.
6. Keluarga tercinta, orang tua penulis Ibu Sri Rahayu dan Bapak Suramin. Keluarga besar Harjowiryatmo, Ibunda Endang Setyowati Wiryaningsih, S.E. (Ibu dari suami), Mas Istriyatno, S.E. dan Mba Nana Dewiretno Mandoyowati, S.H., M Kn. Serta Prof. Dr. Endang Wiryatmi Trilestari, M.Si. yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Sahabat-sahabat Cangcowa yang senantiasa memberi tawa, penghibur di saat sulit, dan pengingat untuk tetap melangkah saat semangat mulai melemah.
8. Para Key Informan dari pengurus dan nasabah bank sampah yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
9. Seluruh rekan kerja peneliti di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan ekan-rekan program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta Angkatan 2025 dan seluruh pihak yang sudah terlibat membantu peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan ilmiah bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tangerang, Juli 2025

Marlinda Erfanti

ABSTRAK

Kolaborasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kota Tangerang

Marlinda Erfanti

2242021068@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara nyata kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Permasalah sampah di Kota Tangerang dapat terlihat dari produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini dapat terlihat dari banyaknya volume persampahan yang masuk ke TPA Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari yaitu sebanyak 494.176.281,08 ton/tahun pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2024 ini volume sampah yang masuk TPA sebanyak 412.514.564,64 ton/tahun (data s.d. 6 September 2023). Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan kolaborasi dengan beberapa bank sampah yang berada di setiap wilayah dalam pengelolaan sampah anorganik. Beberapa aktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut Pemerintah Kota Tangerang yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemimpin dan penggagas dalam pembentukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pemerintah untuk Membentuk Bank Sampah Induk sebagai Koordinator dan Fasilitator yang menghubungkan antara Pemerintah Kota Tangerang dengan bank sampah unit. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif yang menggunakan teori Emmerson dan Nabatchi (2015) dimana pada teori tersebut memiliki pandangan pemerintah daerah bukan merupakan aktor utama yang memiliki inisiatif dalam berkolaborasi. Lebih lanjut *collaborative governance* atau pemerintahan kolaboratif dapat dimaknai sebagai proses, struktur pembentukan dan penerapan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak di instansi pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Pada penelitian lapangan ditemukan beberapa permasalahan kolaborasi yang ada dari segi *procedural and institutional arrangements, leadership, knowledge, resources*.

Kata kunci: Kolaborasi, Kota Tangerang, Pengolahan Sampah, Bank Sampah.

ABSTRACT

Collaboration In Waste Management Through Waste Banks in Tangerang City

Marlinda Erfanti

2242021068@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to observe the actual collaboration carried out by the Tangerang City Government in waste management through waste banks. The waste problem in Tangerang City is evident from the continuously increasing waste production every year. This can be seen from the volume of waste entering the Rawa Kucing landfill in Neglasari sub-district, amounting to 494,176,281.08 tons/year in 2021, while for the year 2024, the volume of waste entering the landfill is 412,514,564.64 tons/year (data as of September 6, 2023). The Tangerang City Government has collaborated with several waste banks located in each region in the management of inorganic waste. Some of the actors involved in this collaboration include the Tangerang City Government, represented by the Environmental Agency as the leader and initiator in forming the collaboration for waste management through waste banks. In accordance with Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Government's Obligation to Establish a Central Waste Bank as a Coordinator and Facilitator connecting the Tangerang City Government with unit-level waste banks. This research uses qualitative research methods based on the theory of Emmerson and Nabatchi (2015), which views that local governments are not the main actors who have the initiative in collaboration. Furthermore, collaborative governance can be understood as a process, structure of formation, and implementation of policies that involve parties from government agencies, the private sector, and the community so that the interests and needs of the community can be met. The field study identified several collaboration issues regarding procedural and institutional arrangements, leadership, knowledge, and resources.

Keywords: Collaboration, Tangerang City, Waste Management, Waste Bank.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rata-rata Sampah Penduduk di Negara Asean.....	2
Tabel 2. Potensi Ekonomis Sampah Kota Tangerang.....	11
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4. Pendekatan Administrasi Publik	22
Tabel 5. Perbandingan antara OPA, NPM dan NPS	26
Tabel 6. Indikator dan Komponen Analisisa	37
Tabel 7. Jumlah Key informan	46
Tabel 8. Key Informan dalam Penelitian	46
Tabel 9. Timbulan Sampah Kota Tangerang	52
Tabel 10. Timbulan Sampah Rumah Tangga	53
Tabel 11. Timbulan Sampah Non Rumah Tangga	54
Tabel 12. Bank Sampah Kota Tangerang	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengurangan Sampah Anorganik Bank Sampah	9
Gambar 2. Teori Kolaborasi Emerson dan Nabatchi	31
Gambar 3. Kerangka berpikir	35
Gambar 4. Sampah Anorganik Bank Sampah	60
Gambar 5. Grafik Pengurangan Timbulan Sampah	62
Gambar 6. Perbandingan Tujuan Bank Sampah	65
Gambar 7. Pentingnya Peraturan dalam Kolaborasi	68
Gambar 8. Fungsi Kemimpinan dalam Kolaborasi	74
Gambar 9. Perbandingan Bank Sampah dan Sedekah Sampah	76
Gambar 10. Fungsi Pengetahuan dalam Kolaborasi	81
Gambar 11. Manfaat Sumber Daya dalam Kolaborasi	88
Gambar 12. Penyebab Tidak Optimalnya Kolaborasi	94
Gambar 13. Strategi Kolaborasi Pengelolaan Sampah	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pemohonan Penelitian	107
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian	108
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	109
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	110
Lampiran 5. Transkri[Sebagian Hasil Wawancara	111
Lampiran 6. LOA Publikasi	128
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	129

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN TEORI	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Teori Administrasi Publik	21
C. Tinjauan Kebijakan	28
D. Tinjauan Teori	30

E. Kerangka Berpikir	34
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Metode Wawancara (<i>Interview</i>)	40
2. Studi Kepustakaan dan Telaahan Dokumen	41
C. Prosedur Pengolahan Data	42
1. Data Wawancara	42
2. Data Telaah Dokumen	43
D. Instrumen Penelitian	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kota Tangerang	51
1. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah	52
2. Sistem Pengelolaan Sampah	55
3. Penyajian Data	57
B. Hasil dan Analisis Penelitian	61
1. Procedural and Institutional Arrangements	66
2. Leadership (Kepemimpinan)	73
3. Knowledge (Pengetahuan)	80
4. Resource (Sumber Daya)	85
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	92
A. Simpulan	92
1. Penyebab Tidak Optimalnya Kolaborasi	92
2. Strategi Agar Kolaborasi Berjalan Secara Optimal	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan standar hidup yang tinggi menyebabkan konsumsi energi dan barang meningkat dan menyebabkan sampah kota bertambah. Sampah perkotaan dapat berasal dari rumah tangga, perkantoran, lembaga skala kecil, dan perusahaan komersial. Meningkatnya produksi sampah berdampak pada kelestarian lingkungan seperti polusi udara, air, emisi gas rumah kaca. Berbagai upaya untuk menerapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan harus dilakukan untuk generasi yang akan datang. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hingga 3,4 ton sampah kota (MSW) dihasilkan di seluruh dunia. Negara-negara di Asia Tenggara menyumbang 1,14 kg/kapita/hari dari MSW di seluruh dunia (Pheakdey et al., 2022). Indonesia menempati urutan pertama sebagai penghasil MSW terbesar di Asia Tenggara dengan 64 juta ton/tahun, diikuti oleh Thailand sebesar 26,77 juta ton/tahun, Vietnam sebesar 22 juta ton/tahun, Filipina sebesar 14,66 juta ton/tahun, dan Malaysia sebesar 12,84 juta ton/tahun. Komposisi sampah perkotaan dari lima negara penghasil terbesar tersebut di atas bervariasi.

Komposisi sampah perkotaan dapat berasal dari sampah dapur dan pekarangan limbah yang berasal dari fraksi biodegradable, kardus, plastik, logam, kaca, bahan inert, limbah elektronik. dari fraksi non-biodegradable (Pomeroy & Resnick, 2013). Semua negara di Asia Tenggara memiliki kota yang menghasilkan sampah yang didominasi oleh sampah organik sebanyak 50- 70% dari total sampah. Setiap negara memiliki variasi dalam karakteristik sampah yang dihasilkan. Indonesia membuang lebih banyak sampah plastik dengan 14% dibandingkan Filipina yang hanya menghasilkan 10,55% sampah plastik dari total komposisi sampah. Namun limbah logam yang dihasilkan di

Filipina 10% lebih banyak dibandingkan di Indonesia yang hanya memilikinya 4,3% dari total sampah. Variasi komposisi sampah perkotaan ini memungkinkan terjadinya perbedaan penanganan dari sumber ke pembuangan antar negara.

Tabel 1. Rata-rata sampah yang dihasilkan oleh penduduk di negara Asean

Table 1 Amount of Waste Generation and Composition of MSW in ASEAN Countries

No.	Countries	Per Capita MSW Generation (kg/capita/day)	Waste Generation		
			Annual MSW Generation (In ton)	Annual Hazardous Waste Generation (In MT)	Annual E-waste Generation (In Metric Kiloton ton)
1	Brunei Darussalam	1.4	210480		
2	Cambodia	0.55	1089429		
3	Indonesia	0.70	64000000		
4	Lao PDR	0.69	77380		8.00
6	Malaysia	1.17	12840000	1517434.06	
5	Myanmar	0.53	841508		
7	Philippines	0.69	14660000	1693856.72	39000
8	Singapore	3.763	7514500	411180	110
9	Thailand	1.05	26770000	3300000	368.314
10	Viet Nam	0.84	22020000		1609.775

Source: Fourth ASEAN State of Environment Report 2009, available from: www.environment.asian.org (accessed 7 August 2016); AIT/UNEP, Municipal Waste Management Report: Status-quo and issues in Southeast and East Asia Countries, 2010; Regional 3R Forum in Asia and the Pacific: Country Report; Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., and Huisman, J., The Global E-waste Monitor, 2014, United Nations University; Country Presentation for 3R Meeting of the Regional 3R Forum; and Basel Convention National Reports -Year 2014, available from: <http://www.basel.int/Countries/NationalReporting> (accessed 7 August 2016); Ocean Conservancy and Trash Free Seas Alliance (2017), the Next Wave: Investment Strategies for Plastic free Seas, p. 69, available from: <http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/the-next-wave.pdf> (accessed 20 March 2017).

Sumber: MSW report in ASEAN Countries 2017

Untuk pengelolaan sampah di negara ASEAN dapat dikatakan masih dalam tahap pengembangan. Secara merata negara-negara ASEAN belum memiliki sistem yang berintegrasi dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Menurut laporan dari *UN Enviroment* tahun 2018 yang membahas mengenai managemen pengelolaan sampah di negara-negara asean, belum adanya pemilahan daeri sumber menjadi masalah yang banyak ditemui di

negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih kurang optimal, karena belum adanya pemilahan sampah yang berasal dari pertokoan, perkantoran, dan rumah warga. Sedangkan untuk limbah seperti besi tua, plastik, kertas, aki bekas kendaraan bermotor yang dapat didaur ulang di ekspor oleh beberapa perusahaan ke negara lain untuk didaur ulang. Hal ini terjadi karena kurangnya teknologi dan fasilitas lokal yang ada di negara Brunei Darussalam dalam pengelolaan limbah daur ulang tersebut (Jain, 2017).

Di Kamboja limbah padat yang dihasilkan dari rumah-rumah, mall, rumah sakit, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya tidak dipilah dan dibuang serta dibakar di tempat pembuangan sampah, sedangkan untuk sampah organik dibiarkan mengalami pengomposan secara alami tanpa adanya pengolahan. Tempat pembuangan sampah yang kapasitasnya kurang memadai. Untuk pengelolaan sampah sebagian besar dilakukan oleh sektor informal meskipun di PhnomPenh ada tiga organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Ada beberapa proyek percontohan mengenai penghijauan, pemilahan dari sumber serta *zero waste life style*. Namun, proyek-proyek tersebut tidak memberikan dampak pada pengelolaan sampah yang ada (Jain, 2017).

Malaysia dalam pengelolaan sampah tidak jauh berbeda dengan negara lain di ASEAN. Fasilitas yang kurang memadai dengan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah pusat daur ulang yang berada di Malaysia tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendaur ulang sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir sudah melebihi kapasitas dan akan berdampak pada kesehatan dan sistem sanitasi air di sekitar lingkungan. Pemilahan sampah dari sumber tidak diwajibkan untuk warga. Hal ini berdampak pada tidak adanya fasilitas khusus yang mengelola sampah organik.

Singapura merupakan salah satu negara maju yang berada di Kawasan ASEAN. Pengelolaan sampah di Singapura saat ini cukup baik karena adanya

fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah. Singapura mendorong warganya untuk berperilaku ramah lingkungan mulai dari pemilahan sampah dari sumber hingga menggunakan produk-produk yang aman bagi lingkungan. Peran serta pemerintah Singapura dalam menetapkan aturan-aturan yang tegas dalam pengelolaan lingkungan berdampak baik dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang meliputi kebersihan, pengelolaan sampah, dll (Jain, 2017).

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 264 juta jiwa (BPS tahun 2022). Jumlah penduduk yang banyak tersebut berdampak pada banyaknya sampah yang dihasilkan. Selain dari jumlah sampah yang dihasilkan karakteristik dan jenis sampah semakin beragam. Perkembangan industri dan teknologi juga memberikan pengaruh negatife. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia selain tingginya volume sampah yang dihasilkan, faktor lain yang mempengaruhi adalah rendahnya pemilahan dari sumber serta belum optimalnya pengelohan sampah di TPST, kapasitas atau daya tampung TPA yang terbatas jumlahnya, sumber daya dan anggaran turut andil dalam permasalahan pengelolaan sampah, Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kemandirian dalam pemilahan sampah masih sangat kurang sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah terutama dikota-kota besar karena dapat menimbulkan banjir.

Sampah yang tidak diolah dapat berdampak buruk pada kehidupan dan merupakan salah satu masalah yang akan terus dihadapi daerah terutama kota metropolitan. Masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab atas masalah sampah ini selain pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dapat dilakukan dengan mengubah perilaku dalam pemakaian barang yang berpotensi menjadi sampah dengan cara 3R, yaitu: mengurangi (*reduce*), memanfaatkan sampah yang masih layak dipakai (*reuse*) dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru (*recycle*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dengan memaksimalkan potensi yang

ada di daerah. Jika masyarakat berpartisipasi secara aktif dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah, hal ini akan berdampak positif (Legi et al., 2019). Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Sejalan dengan gagasan tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk menyikapi beberapa persoalan yang hadir di Masyarakat (Mifta Farid, 2020.).

Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi mampu menjadi upaya mitigative untuk mengelola hubungan masyarakat dengan pemangku kebijakan atau pemerintah serta keberadaan program pemberdayaan masyarakat ini berdampak pada kualitas lingkungan hidup meningkat. Adapun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi berjalannya program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat harus memiliki pedoman untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam proses pemberdayaan (Mahameru, 2021). Hal lain juga dapat dilihat dari dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek-proyek pemberdayaan yang diprakarsai terutama pada tingkat wilayah tertentu yang masyarakatnya memiliki karakteristik masih tradisional dan masih kental dengan budaya. Pada akhirnya, proses perencanaan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam perekonomian dan kesejahteraannya.

Bank sampah yaitu bentuk pengelolaan sampah yang didalamnya terdapat peran masyarakat. Mekanisme berjalannya pengelolaan tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang terdiri dari anorganik dan organik. Sampah yang sudah terpilah akan dikumpulkan secara kolektif yang kemudian dibantu dinas terkait untuk penyaluran di pasar. Dengan demikian, menabung sampah akan membawa manfaat secara finansial dalam lingkungan masyarakat. Tujuan utama pendirian

bank sampah adalah untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah. Tujuan Bank Sampah selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran akan lingkungan yang nyaman serta sehat.

Bank sampah juga didirikan untuk mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna bagi masyarakat, seperti perkakas buatan tangan dan penyubur tanah yang berkualitas. Bank sampah memiliki sejumlah keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran akan nilai kebersihan, dan mengubah sampah menjadi barang yang dapat dipasarkan. Masyarakat memperoleh keuntungan dari bank sampah dengan memperoleh penghasilan tambahan lebih karena mereka menerima pembayaran untuk menukar sampah dalam bentuk dana yang terkumpul di rekening mereka. Ketika orang memiliki tabungan yang cukup besar, mereka dapat mengakses dana mereka kapan pun mereka mau. Imbalan yang diberikan kepada masyarakat yang menabung sampah tidak hanya berupa uang namun dapat berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula ataupun minyak yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan terkait pengelolaan sampah ini merupakan bagian dari pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memerlukan sinergitas kebijakan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyejahterakan rakyat. Pada SDGs 12, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, sebagai bagian dalam pilar pembangunan lingkungan yang salah satu indikatornya menargetkan pada tahun 2030, mengurangi sebagian besar atau setengah jumlah sampah pangan global perkapita pada tingkat produsen dan konsumen serta memperkecil kerugian makanan sepanjang proses produksi, termasuk kerugian pasca panen.

Pengelolaan sampah dengan bank sampah membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi itu keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Andi Uceng, 2019). Partisipasi

sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Kache et al., 2019).

Perkembangan bank sampah di Provinsi Banten apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa termasuk dalam urutan terakhir. Menurut data dari Ditjen PSLB3 KLHK tahun 2021 mengenai jumlah bank sampah di setiap provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Banten berada di urutan terakhir dengan jumlah bank sampah 257 unit, sedangkan jumlah provinsi lain seperti DKI Jakarta dengan 2818 unit bank sampah, Jawa Barat dengan 4134 unit bank sampah, Jawa Tengah dengan 3653 unit bank sampah, Jawa Timur dengan 4949 unit bank sampah (Ditjen PSLB3 KLHK, 2021). Jumlah unit bank sampah yang berada di Provinsi Banten sangat jauh dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pengelolaan sampah harusnya didukung dengan implementasi kebijakan pemerintahan daerah (Ruslinda et al., 2018). Sistem penstrukturan sampah serta keberlangsungan kebijakan tersebut di Kota Serang belum terlaksana secara optimal yang dapat dilihat dari jenis timbulan sampah dengan volume yang cukup besar. Partisipasi masyarakat yang kurang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Provinsi Banten menduduki posisi terakhir dalam jumlah unit bank sampah.

Kota-kota besar yang berada di dalam Provinsi Banten memegang peranan penting dalam perkembangan bank sampah. Dari data Ditjen PSLB3 KLHK jumlah bank sampah yang terdapat pada kota atau kabupaten di Provinsi Banten sebagai berikut, Kota Tangerang Selatan dengan 131 unit bank sampah, Kota Tangerang dengan 64 unit bank sampah, Kota Serang 26 unit bank sampah, sedangkan untuk kabupaten dan kota lain jumlah bank sampah yang ada dibawah 10 unit. Hal ini mendorong Provinsi Banten untuk melakukan pembinaan bank sampah dalam pengelolaan sampah. Kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga melalui Program bank sampah merupakan salah satu hal yang dibutuhkan saat ini. Kurangnya kesadaran

masyarakat yang masih terus menjadi kendala utama dalam upaya penanganan persoalan sampah di berbagai daerah. Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut ambil bagian terhadap persoalan sampah, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih sangat memprihatinkan. Terutama di Provinsi Banten dimana terdapat kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal.

Pada tahun 2021 Provinsi Banten telah menetapkan lokasi PSN (Proyek Strategi Nasional). Salah satu lokasi Proyek Strategi Nasional mengenai pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berada di Kota Tangerang. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan salah satu misi pembangunan Kota Tangerang yaitu, "Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan". Sebagai upaya untuk mewujudkan PSEL dan misi pembangunan dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka strategi yang dilakukan yaitu peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir

Permasalahan sampah di Kota Tangerang dapat terlihat dari produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini dapat terlihat dari banyaknya volume persampahan yang masuk ke TPA Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari yaitu sebanyak 494.176.281,08 ton/tahun pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 ini volume sampah yang masuk TPA sebanyak 412.514.564,64 ton/tahun (data s.d. 6 September 2022), dengan rata-rata mencapai 1.650 ton per harinya (<https://green.tangerangkota.go.id/>). Dari jenis sampah tersebut sekitar 60-70% merupakan sampah organik (sampah rumah tangga) dan sisanya merupakan sampah non organik. Untuk dapat menghasilkan tempat yang aman, nyaman, sehat, efisien, dan berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur pengelolaan sampah yang efektif.

Gambar 1. Pengurangan Sampah Anorganik Bank Sampah



Sumber: website green Kota Tangerang

Dalam pengelolaan sampah tidak cukup sampai pada tahap pelayanan ke Tempat Proses Akhir (TPA), tetapi diperlukan upaya agar sampah yang sampai di TPA sudah benar-benar tidak termanfaatkan kembali. Untuk itu pemerintah perlu mendayagunakan sampah agar dapat berdayaguna dan lebih ekonomis. Di Kota Tangerang, pada tahun 2021 telah memenuhi target dalam pengurangan sampah yaitu mencapai sebesar 18,33% atau setara dengan 90.578,09 ton/tahun yang berhasil direduksi, dihitung berdasarkan total jumlah pembatasan timbulan sampah, sampah yang termanfaatkan, dan sampah yang didaur ulang dibandingkan dengan produksi volume timbulan sampah seluruh masyarakat Kota Tangerang yang mencapai 494.177,11 ton/tahun pada tahun 2021 (Dinas Lingkungan Hidup, 2022). Agar dapat mendukung PSN yang berupa PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) maka dibutuhkan presentase lebih besar dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dengan melibatkan beberapa pihak dalam pengelolaan sampah diharapkan landasan dasar untuk PSEL dapat terwujud.

Kolaborasi pemerintah dan beberapa pihak dibutuhkan agar tujuan kebermanfaatan bank sampah dapat tercapai. Dalam kolaborasi setiap

pemangku kepentingan memiliki peran dan keterlibatan dalam mencapai tujuan Bersama (Asropi et al., 2022). Kolaborasi pemerintah juga diperlukan dalam penanganan masalah bencana alam tertentu seperti kolaborasi yang dilakukan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam menangani banjir di daerahnya. Dalam proses kolaborasi keikutsertaan setiap *actor* yang berkepentingan sangat berpengaruh terhadap berjalannya kolaborasi, sehingga dapat disimpulkan pemerintah daerah sebaiknya menyediakan ruang untuk bertukar gagasan dengan pemangku kepentingan yang lain guna pelaksanaan *Collaborative Governance* yang lebih baik dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula (Nurliah et al., 2022).

Masalah pengolahan sampah bisa menjadi bencana bila tidak ditangani pemerintah daerah secara intensif. Pentingnya kolaborasi pemerintah dapat dilihat dari contoh kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung tentu dalam sektor pertanian tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam sumber daya yang merupakan faktor utama yang menghambat berjalannya suatu program maka menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, baik itu dengan sesama pemerintah, pihak swasta ataupun masyarakat, pihak akademis yang dapat diwakili perguruan tinggi, serta dengan komunitas masyarakat sipil lainnya. Konsep kerjasama untuk memperoleh tujuan yang diinginkan semua pihak inilah yang kemudian dikenal dengan *Collaborative Governance*. Di Kabupaten Bandung peran pemerintah daerah masih cukup besar apabila dibanding dengan sektor swasta (Iyoeaga et al., 2020).

Bank Sampah di Kota Tangerang sudah mulai berjalan dari tahun 2014 sampai sekarang dengan tahun 2022 berjumlah 66 bank sampah aktif yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Tangerang. Dari data yang diambil dari <https://green.tangerangkota.go.id/> total sampah anorganik yang dikelola bank sampah berjumlah 330.528,67 Kg/tahun dan dengan total anorganik tersebut menghasilkan Rp. 700.260.895,00 (DLH Kota Tangerang). Hal ini berdampak positif bagi masyarakat dan juga pemerintahan karena dengan adanya bank

sampah mendorong masyarakat semakin aktif dalam pengelolaan sampah anorganik.

Tabel 2. Potensi Ekonomis Sampah Kota Tangerang

KOMPOSISI SAMPAH	PRESENTASE			BERAT	HARGA SATUAN	TOTAL POTENSI/TAHUN
	KOMP KEMARAU	KOMP PENGHUJAN	RATA2 (%)	TON/HARI	(Rp/kg)	
Organik Petrucible	64,61	55,72	60,165	842,31		
Organik Combustible	3,83	12,8	8,315	116,41		
Kertas/Kardus	8,78	7,5	8,14	113,96	400	Rp 16.638.160.000
Plastik/Kresek	16,44	12,51	14,475	202,65	1200	Rp 88.760.700.000
Tekstil	2,59	4,06	3,325	46,55		
Karet	0,34	0,69	0,515	7,21		
Kleng/Logam	0,1	1,17	0,635	8,89	2500	Rp 8.112.125.000
B3	2,32	1,67	1,995	27,93		
Inert	0,99	3,88	2,435	34,09		
JUMLAH						Rp 113.510.985.000

Sumber: Masterplan Persampahan Kota Tangerang 2022-2027

Dari Tabel potensi sampah yang ada di Kota Tangerang angka capaian bank sampah yang ada di Kota Tagerang belum sesuai dengan angka potensi ekonomis sampah Kota Tangerang yang sudah tertuang dalam Masterplan Persampahan Kota Tangerang. Dimana pertahun 2022 total perolehan bank sampah seluruh Kota Tangerang Rp. 700.260.895,00 (DLH Kota Tangerang 2022) sedangkan angka potensi ekonomis sampah Kota Tangerang Rp 113.510.985,00 (Masterplan Persampahan Kota Tangerang 2022). Adanya beberapa kendala yang ada di bank sampah menjadi salah satu faktor penyebab belum tercapaian angka potensi ekonomis sampah tersebut. Salah satu kendalanya adalah belum banyak kemitraan dari pengepul sampah yang menampung hasil pilahan anorganik yang bekerjasama dengan Bank Sampah Induk. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan sampai dengan tahun 2022 terdapat 3 Pengepul Sampah Anorganik yang bemitra dengan Bank Sampah Induk.

Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang untuk laporan jumlah unit bank sampah di Kota Tangerang Tahun 2022 terdapat 160 unit bank

sampah yang dengan status non aktif (DLH Kota Tangerang ,2022). Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dalam mengembangkan bank sampah dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.

Beberapa kendala kolaborasi yang dialami oleh Pemerintah Kota Tangerang dan beberapa unit bank sampah adalah adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kolaborasi dimana peran bank sampah tidak hanya sebagai sebagai pengurus dalam pengelolaan bank sampah namun juga sebagai pihak dari masyarakat yang membantu sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk-produk yang sulit untuk diolah kembali. Menurut (Astari, 2019) dengan adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kolaborasi yang telah dijalankan akan menimbulkan permasalahan baru dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kendala kolaborasi yang dialami dalam pengelolaan bank sampah dalam hal ketaatan pada peraturan yang telah disepakati bersama dimana ditemukan di beberapa lokasi di Kota Tangerang, seperti setidaknya ada beberapa bank sampah yang fungsinya tidak berjalan secara optimal yang berada di Kelurahan Cipete Kota Tangerang dikarenakan pengalihfungsian lahan bank sampah menjadi tempat pengepul sampah anorganik. Isu-isu tersebut memiliki berbagai akar penyebab yang menimbulkan kendala dalam kolaborasi antara lain ketidakpahaman petugas bank sampah dalam pengelolaan bank sampah dalam pemanfaatan teknologi salah satu contohnya adalah bank sampah yang berada di Kecamatan Periuk dimana catatan administrasi yang tidak terinput secara menyeluruh pada aplikasi bank sampah sehingga menurunkan kepercayaan nasabah bank sampah dan berpengaruh dalam kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.

Kolaborasi yang selama ini dilakukan hanya melibatkan BSI (Bank Sampah Induk) sebagai mitra dari pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam mengenai permasalahan kolaborasi dalam pengelolaan

bank sampah di Kota Tangerang. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerjemahkan dan menindaklanjuti harapan masyarakat terhadap perkembangan bank sampah sehingga pengelolaan bank sampah di lingkungan Kota Tangerang semakin maju dan berdaya guna.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan maka dapat diidentifikasi masalah yang kemudian akan dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut. Identifikasi masalah dapat dibagi menjadi beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. *Sharing knowledge* dalam kolaborasi masih belum berjalan hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber. Hal ini didukung dengan adanya beberapa bank sampah di Kota Tangerang yang tidak berjalan karena kehilangan nasabah.
2. Masih sedikit pihak swasta yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Dari data Dinas Lingkungan Hidup hanya terdapat 3 pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
3. Belum adanya keterlibatan media dalam kolaborasi pengolahan sampah di Kota Tangerang. Dalam sosialisasi yang dilakukan untuk memahami masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah masih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui media sosial yang dimiliki.
4. Belum adanya pihak akademisi yang terlibat dalam memberikan masukan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang membahas mengenai bank sampah dilakukan dengan pihak swasta melalui program kegiatan.

5. Belum adanya Perjanjian antara pihak swasta yang dapat mendukung kegiatan sosialisasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah.
6. Belum adanya dukungan dari organisasi masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Kota Tangerang yang sudah dilakukan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah?
2. Mengapa kolaborasi Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah belum optimal?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi, menganalisa mengenai kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kota Tangerang serta pengembangan bank sampah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kota Tangerang, serta rekomendasi kebijakan pemerintah daerah apa saja yang terkait dengan system bank sampah tersebut. Sasaran dalam pencapaian tujuan penelitian yaitu :

1. Mengidentifikasi Kolaborasi Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah saat ini.
2. Menganalisis konsep rekomendasi kebijakan yang akan dibutuhkan dalam mendukung kolaborasi pemerintah dalam pengelolaan bank sampah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Tangerang untuk menentukan kebijakan dalam kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah
3. Sebagai bahan masukan untuk menentukan kolaborasi tata kelola bank sampah agar berjalan optimal.
4. Program Bank Sampah digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan persampahan yang sistemnya sesuai dengan peraturan baru yang sudah ditetapkan.
5. Sebagai sumber untuk penelitian lebih lanjut tentang topik ini atau penelitian tentang topik yang relevan dengan penelitian ini.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen terhadap kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan dalam menerapkan kebijakan tersebut, terdapat beberapa variabel kunci yang memengaruhi kelancaran dan kesuksesannya. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara berbagai pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan guna memastikan bahwa kolaborasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Dari tinjauan teori Nabatchi dan Emerson ada beberapa aspek yang memengaruhi ketidakefektifan kolaborasi tersebut diantaranya adalah *Prosedural and institutional arrangement, Leadership (Kepimpinan), Knowledge, Resource*.

1. Penyebab Tidak Optimalnya Kolaborasi

a. *Prosedural and institutional arrangement*

Belum adanya perjanjian yang mengikat antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan Bank sampah Induk sebagai koordinator dari bank sampah unit. Sehingga kinerja yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk tidak termonitor oleh Dinas Lingkungan Hidup. Belum adanya SOP dalam Bank Sampah

Induk dalam pemantauan jumlah bank sampah yang sudah tertangani. Hal ini tercermin dari belum adanya data pendukung dari bank sampah induk dalam pengelolaan sampah anorganik.

b. *Leadership (Kepimpinan)*

Belum adanya komitmen dari Bank Sampah Induk sebagai coordinator dari bank sampah untuk mendorong peran aktif dari bank sampah unit. Hal ini tercermin dari belum adanya kegiatan yang diprakarsain oleh Bank Sampah Induk untuk memberikan motivasi atau sebagai wadah pertukaran informasi dalam kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah.

c. *Knowledge (Pengetahuan)*

Penyampaian informasi yang masih kurang optimal dalam kolaborasi pengelolaan sampah dengan bank sampah terkait dengan keberadaan Bank Sampah Induk yang berfungsi sebagai coordinator dari seluruh bank sampah unit yang ada di Kota Tangerang. Membutuhkan sosialisasi yang lebih intens dalam penyampaian pentingnya keberadaan Bank Sampah Induk dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang. Tidak adanya keterlibatan akademisi dalam kolaborasi yang terjadi, sehingga tidak adanya kekinian informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Kekinian informasi tentang pengelolaan sampah dibutuhkan agar sesuai dengan perkembangan jaman yang diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

d. *Resource (Sumber daya)*

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Kapasitas SDM dalam bank sampah induk maupun bank sampah unit belum cukup optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan yang masih kerap ditemui di lapangan.

Terjadi perselisihan dalam bank sampah-bank sampah unit terkait administrasi dalam penginputan data sampah anorganik yang terolah, keterlambatan terkait penginputan jumlah sampah yang sudah tertangani oleh pengurus bank sampah.

Sumber daya yang berupa anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah menjadi kendala dalam perkembangan bank sampah. Kerjasama dengan pihak swasta diharapkan juga dapat dijaln lebih *intens*. Kerjasama dengan pihak swasta selama ini hanya berlangsung tidak lebih dari 2 bulan.

Gambar 12. Penyebab Tidak Optimalnya Kolaborasi



Sumber: data diolah peneliti

2. Strategi Agar Kolaborasi Berjalan Secara Optimal

Berdasarkan hasil analisis kolaborasi di atas dan tinjauan teori Nabatchi dan Emerson (2015) pada bab sebelumnya, berikut adalah strategi yang dapat diambil untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang. Strategi ini dibagi berdasarkan 4 aspek *prosedural and instituonal, leadership, knowledge, resource*. Pembagian strategi berdasarkan 4 aspek tersebut memungkinkan kolaborasi berjalan optimal dengan cara yang terstruktur dan efektif. Ini memastikan bahwa setiap aspek dapat terpenuhi dan berjalan sesuai tujuan, sehingga menghasilkan dampak yang maksimal dan berkelanjutan.

Strategi yang utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang dengan membuat kebijakan yang mengatur secara terperinci mengenai kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Strategi Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang berikutnya berdasarkan setiap aspek berdasarkan teori Nabatchi dan Emerson.

a. *Procedural and instutisional arrangement*

- Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk segera membuat kesepakatan dengan Bank sampah Induk agarkinerja Bank Sampah Induk lebih terkontrol dan terukur
- Menyusulkan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk membuat regulasi terkait dengan harga sampah anorganik.
- Membuat SOP untuk Bank Sampah Induk supaya operasional yang berkaitan dengan Bank Sampah Unit ‘dapat berjalan secara optimal

b. *Leadership*

- Memberikan usulan kepada pemimpin untuk membentuk aturan yang mengikat mengenai peran aktif ASN dalam sedekah dan bank sampah.
- Mendorong peran aktif dari Bank sampah induk dan bank sampah unit agar dapat menginisiasi kegiatan terkait pengelolaan sampah anorganik dan tidak bergantung pada DLH.
- Memberikan arahan untuk Bank Sampah Induk dalam kerangka kerja yang terarah agar fungsi sebagai coordinator bank sampah unit dapat berjalan.

c. *Knowledge*

- Membentuk forum bersama dalam kolaborasi ini agar bank sampah induk dan bank sampah unit dapat berbagi informasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
- Memberikan dorongan kepada bank sampah induk dan bank sampah unit agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah anorganik
- Membentuk koneksi dengan akademisi agar terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah anorganik

d. *Resource*

- Mengidentifikasi kesenjangan fasilitas yang ada di setiap bank sampah.
- Menentukan standar minimal sarana dan prasarana yang harus dimiliki setiap Bank Sampah,

- Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk petugas Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Uni

Gambar 13. Strategi Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang



Sumber: data diolah peneliti

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui bank sampah di Kota Tangerang maka direkomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Pemerintah Kota Tangerang diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah melalui penetapan kebijakan yang tepat. Salah satunya dengan menetapkan aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga, termasuk berpartisipasi dalam program sedekah sampah sebagai bentuk keteladanan. Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan regulasi yang mengatur harga jual sampah anorganik sebagai acuan yang digunakan oleh seluruh bank sampah di wilayah Kota Tangerang. Untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan ASN dalam mendukung program ini, sistem reward and punishment dapat diterapkan secara adil dan terukur, khususnya dalam aspek pengelolaan sampah anorganik.

Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam rangka memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Langkah-langkah tersebut antara lain menetapkan kesepakatan dengan Bank Sampah Induk sebagai bentuk komitmen bersama, serta membuat aturan yang mendukung peran Bank Sampah Induk dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan Bank Sampah Unit secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap kesenjangan fasilitas di setiap bank sampah dan penetapan standar minimal sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh masing-masing bank sampah. Dinas juga mendorong pelibatan akademisi dalam kegiatan atau kajian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah guna memperkuat landasan ilmiah dan efektivitas program yang dijalankan.

Bank Sampah Induk diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan membangun koneksi yang kuat dengan pihak swasta, sehingga pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain

itu, komunikasi yang intensif dengan Bank Sampah Unit perlu terus dibangun guna memastikan koordinasi dan sinergi yang baik. Sebagai wadah kolaborasi dan pertukaran informasi, Bank Sampah Induk juga perlu memfasilitasi forum diskusi rutin antara Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit agar tercipta pemahaman dan langkah bersama dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Bank Sampah Unit memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat pengelolaan sampah melalui bank sampah, sehingga tercipta kesadaran dan keterlibatan aktif. Selain itu, Bank Sampah Unit juga didorong untuk menjalin kolaborasi dengan pelaku UMKM daur ulang sebagai upaya mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, Bank Sampah Unit dapat mengembangkan produk-produk kreatif dari limbah anorganik, yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Pihak swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah melalui keterlibatan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada penguatan peran bank sampah. Salah satu bentuk konkret keterlibatan tersebut adalah dengan membangun bank sampah binaan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang bersinergi dengan bank sampah binaan pemerintah. Selain itu, pengembangan industri hilir daur ulang yang mampu menyerap produk hasil olahan bank sampah juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Pihak swasta juga dapat memberikan kontribusi melalui penyelenggaraan atau pendanaan pelatihan keterampilan bagi pengelola bank sampah, seperti pelatihan pemilahan, pembukuan, digitalisasi, dan manajemen usaha. Tidak kalah penting, kerja sama dengan sekolah, komunitas, serta RT/RW dalam pembentukan bank sampah berbasis komunitas menjadi bagian dari peran swasta dalam memperluas

jangkauan pengelolaan sampah berbasis partisipatif.

Terkait output penelitian dan penelitian selanjutnya Kolaborasi Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Tangerang memeberikan rekomendasi terkait dengan beberapa factor yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam kolaborasi tersebut.

Penerapan rekomendasi ini sangat bergantung pada peran pimpinan dalam mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan dalam kolaborasi. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam proses analisis dan validasi data.

Untuk analisis data yang lebih mendalam, pemilihan key informant dapat melibatkan beberapa komunitas lingkungan yang terlibat dalam pengelolaan sampah anorganik.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Tangerang: Dinas Lingkungan Hidup.

Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif dan kolaboratif. Yogyakarta. Gajah Mada University Press

Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. Collaborative Governance Regime. Washington: Georgetown University. Hal 5-6

Frederickson, H. George & Kevin B Smith. 2007. The Public Administration Theory Primer. United State of America: Westview Press

Kartono, Kartini. 1987. Kamus Psikologi. PT. Pionir Jaya. Bandung

Mardikanto T. 2010. Komunikasi Pembangunan. Surakarta (ID): UNS Press.

Moleong, Lexy J., (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Riggio, Ronald.E. 1990. Introduction to Industrial-Organizational Psychology. London: Forestman and Company

Slamet M. 2003. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan. Di dalam: Yustina I, Sudrajat A, Penyunting. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan: Didedikasikan kepada Prof. Dr. H.R

Margono Slamet. Bogor (ID): IPB Press.

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL ILMIAH

1, H. I. U., 2, N. N., & 3, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula Kepulauan Sula. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yakni kejadian banjir yang sering terjadi tiap t. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.

Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021). Collaborative governance in managing plastic waste in Bali. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>

Andi Uceng, A. A. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MJurnal Moderat*, 5(2), 1–17.

Dayana, M. (2021). KABUPATEN KAMPAR STAKEHOLDERS COLLABORATION IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN KABUPATEN KAMPAR oleh sampah, baik sampah organik volume yang menyebabkan permasalahan baru Di keberadaan Tempat Pembuangan Akhir. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19,.

Hertati, D., & Arif, L. (2022). Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank. *KnE Social Sciences*, 2022, 1–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10923>

Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2021). Praktik Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Dalam Pengelolaan Tpa Regional Piyungan Tahun 2020). *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), LAYOUTING. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12608>

Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>

Jain, A. (2017). Summary Report Waste Management. *United Nations Environment Programme*, 14. <https://www.unep.org/ietc/resources/publication/waste-management-asean-countries-summary-report>

Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.

Legi, A. F., Manado, A. K., Sulawesi, P., Program, U., Pemerintahan, S. A., Fakultas, D., & Pemerintahan, M. (n.d.). *STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA*.

Mahameru, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah: Systematic Literatur Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 9(2), 120–136. *mifta farid*. (n.d.).

Morse, R. S., Buss, T. F., & Kinghorn, C. M. (2014). Transforming Public Leadership for the 21st Century. In *Transforming Public Leadership for the 21st Century*. <https://doi.org/10.4324/9781315698588>

- Pheakdey, D. V., Quan, N. Van, Khanh, T. D., & Xuan, T. D. (2022). Challenges and Priorities of Municipal Solid Waste Management in Cambodia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph19148458>
- Politeknik STIA LAN Jakarta, A., Daniati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, A., & Ulfa Badan Riset dan Inovasi Nasional, M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN INDONESIAN INNOVATION STARTUP PROGRAM: THE MASKIT STARTUP CASE STUDY* (Vol. 20, Issue 1). Jurnal Administrasi Publik.
- Pomeroy, S. H., & Resnick, B. (2013). The Challenges and Benefits of. *Journal of Professional Nursing*, 29(1), 39–48.
- Qalby, A. N. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat)*. 1–81.
- Ruslinda, Y., Raharjo, S., & Putri, D. F. (2018). *KAJIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH TANGGA (SB3-RT) DI KOTA PADANG* (Vol. 17).
- Suryani, S. (2022). Domestic Waste Management Based on Collaborative Governance in Pekanbaru City. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16364>
- Asropi, M. U. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN INDONESIAN INNOVATION STARTUP PROGRAM: THE MASKIT STARTUP CASE STUDY*.

Bagus Nuari Harmawan, I. W. (2017). *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui* , 50-55.

Dayana, M. (2021). *KABUPATEN KAMPAR STAKEHOLDERS COLLABORATION IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN KAMPAR DISTRICT KAMPAR oleh sampah , baik sampah organik volume yang menyebabkan permasalahan baru Di keberadaan Tempat Pembuangan Akhir.*

Edwards, G. &. (2008). *Collaborative Leadership as a Necessary Condition for Successful* , 109-122.

Evi Sirait, H. M. (2024). PERAN FUNGSI KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI ANTARA. *Edunomika – Vol. 08, No. 02, 2024*, 1-8.

Fatonah Putri Pratiwi, G. S. (2023). Strategi Karakter Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa FIP UMJ Di Era 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 109.

Furqoni, I. R. (2019). *Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency.*

H George Federickson, K. B. (2018). *The Public Administration Theory Primer.*
Qalby, A. n. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat).*

Sinaga, N. A. (2018). *PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN.*

Wang, H. X. (2020). *How doesz public- private collaboration reinvent? A comparative analysis of urban bicyclsharing policy diffusion in China.*

Wening Winursita, R. C. (2024). Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. *Strategi Literasi Sampah dalam Penanggulangan Masa Tanggap Darurat Sampah.*

Wilson, S. (2013). *Collaborative Leadership: It's Good to Talk. British Journal of Healthcare* , 335–337.

Yenni Ruslinda, S. R. (2018). *KAJIAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH TANGGA (SB3-RT) DI KOTA PADANG*, 1-12.

C. PERUNDANGUNDANGAN

Peraturan Menteri KLHK No. 14 Tahun 2021 Peraturan Menteri KLHK NO. 13 Tahun 2012